

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.1.1. Hak dan akses masyarakat adat atas sumber daya alam.....	1
1.1.2. Konflik pengelolaan sumber daya alam di Papua dan Papua Barat	2
1.1.3. Perumusan masalah	3
1.1.4. Keaslian penelitian	5
1.1.5. Kebaruan penelitian.....	6
1.2. Tujuan penelitian.....	8
1.3. Manfaat penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
2.1. Tinjauan pustaka	9
2.2. Landasan teori	16
2.2.1. Hak dan akses atas sumber daya hutan	16
2.2.2. Masyarakat adat dan penguasaan hutan di Indonesia.....	20
2.2.3. Konflik pengelolaan sumber daya alam.....	21
2.2.4. Ideologi konservasi	23
2.2.6. Ekologi Politik	24
2.2.7. Teori keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan	25
2.2.8. Teori kuasa (<i>power</i>).....	30

2.3. Kerangka pemikiran penelitian.....	32
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Metode dan pendekatan penelitian	35
3.2. Obyek penelitian	36
3.3. Waktu dan lokasi penelitian	36
3.4. Teknik pengumpulan data	37
3.4.1. Analisis isi.....	37
3.4.2. Wawancara mendalam	38
3.4.3. Survei rumah tangga.....	39
3.4.4. Pengamatan terlibat (observasi partisipasi)	39
3.5. Jenis dan Sumber Data	39
3.5. Analisis data.....	42
3.5.1. Identifikasi eskalasi konflik.....	42
3.5.2. Identifikasi ketidakadilan dalam kesenjangan hak dan akses atas lahan	42
3.5.3. Analisis relasi kuasa dalam konflik penggunaan lahan.....	43
3.5.4. Implikasi keadilan pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat.....	46
3.6. Reliabilitas dan validitas penelitian	47
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI	48
4.1. Kondisi biofisik.....	48
4.1.1. Letak dan kondisi geografis.....	48
4.1.2. Iklim.....	50
4.1.3. Topografi dan kelas kemiringan.....	52
4.1.4. Hidrologi	52
4.1.5. Tanah.....	52
4.1.6. Vegetasi.....	53
4.1.7. Satwa Liar	54
4.2. Kondisi sosial ekonomi dan budaya	55
4.2.1. Keadaan penduduk	55
4.2.2. Sumber mata pencaharian.....	56
4.2.3. Asal usul suku, adat istiadat dan sistem hak	57
4.2.4. Kelembagaan Adat Suku Mpur	59
BAB V. KONFLIK KEBIJAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN SEBAGAI AREAL PENGEMBANGAN SAWIT DI KABUPATEN TAMBRAUW	61

5.1. Kebijakan alokasi kawasan hutan untuk pengembangan areal perkebunan PT. BAPP	61
5.2. Aktor dalam kebijakan alih fungsi kawasan hutan sebagai areal pertanian PT. BAPP di Kebar Kabupaten Tambrau, Papua Barat	64
5.2.1. Aktor pemerintah.....	66
5.2.2. Aktor di luar aktor pemerintah	69
5.3. Sumber konflik masyarakat adat Suku Mpur dan PT. BAPP di Kebar	71
5.4. Eskalasi konflik perkebunan PT BAPP di Kebar.....	72
5.5. Upaya resolusi konflik	78
BAB VI. ASPEK KEADILAN KONTEKSTUAL DALAM KONFLIK LAHAN.81	
6.1. Politik makro alokasi kawasan hutan untuk peningkatan produksi sawit	81
6.2. Ketidakjelasan pencabutan izin konsesi PT BAPP	83
6.3. Kontestasi ruang antara masyarakat adat, Kabupaten Tambrau, dan Provinsi Papua Barat.....	84
6.3.1. Ketidakjelasan status kawasan hutan sebagai areal konsesi PT BAPP	84
6.3.2. Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten konservasi.....	86
6.3.3. Provinsi pembangunan berkelanjutan Papua Barat.....	88
6.4. Ketidakjelasan dan keterbatasan kelola kawasan hutan dalam konteks Otonomi Khusus.....	90
6.5. Pola penguasaan sumber daya masyarakat adat di Tanah Papua	92
6.6. Fragmentasi adat dan kelembagaan masyarakat adat Papua	94
6.7. Implikasi keadilan kontekstual	96
BAB VII. ASPEK KEADILAN PROSEDURAL DALAM KONFLIK LAHAN...98	
7.1. Partisipasi masyarakat adat Suku Mpur dalam kebijakan penggunaan lahan PT BAPP	98
7.1.1. Partisipasi pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan penggunaan lahan PT BAPP Periode 2007 – 2014.....	99
7.1.2. Partisipasi pada tahap implementasi kebijakan penggunaan lahan PT. BAPP Periode 2015 - 2021	101
7.2. Pelaksanaan prosedur pengurusan izin legal PT. BAPP	105
7.3. Mekanisme kompensasi (MoU, perjanjian kerjasama)	108
7.4. Pemenuhan tanggung jawab atau komitmen yang dibuat oleh otoritas PT. BAPP kepada masyarakat adat Suku Mpur dan Pemerintah	109
BAB VIII. ASPEK KEADILAN DISTRIBUSI DALAM KONFLIK LAHAN.....111	
8.1. Akses pada kawasan hutan savana	111

8.1.1. Akses pada kawasan hutan savana sebelum investasi PT BAPP	112
8.1.2. Perubahan akses kawasan hutan savana pada tahap implementasi penggunaan lahan PT. BAPP Periode 2015 – 2021	113
8.2. Manfaat dan beban dari implementasi penggunaan lahan oleh PT BAPP	116
8.2.1. Manfaat ekonomi dari implementasi penggunaan lahan oleh PT BAPP	116
8.2.2. Distribusi beban dari implementasi penggunaan lahan PT. BAPP	121
8.3. Kecukupan sumber daya alternative atau kompensasi	122
BAB IX. ASPEK KEADILAN REKOGNISI DALAM KONFLIK LAHAN.....	124
9.1. Pengakuan identitas sosial dan budaya masyarakat Suku Mpur	124
9.2. Perlindungan simbol adat dan nilai adat Suku Mpur	126
BAB X. DISKUSI UMUM DAN IMPLIKASI.....	129
10.1. Pengantar.....	129
10.2. Konflik alih fungsi kawasan hutan sebagai areal pertanian PT. BAPP di Kebar.....	130
10.3. Konflik sebagai gejala ketidakadilan.....	132
10.4. Aspek keadilan dalam konflik alih fungsi kawasan hutan sebagai areal pertanian PT. BAPP di Kebar.....	134
10.5. Gejala ketidakadilan sebagai akibat ketimpangan relasi kuasa	137
10.6. Kondisi pengelolaan sumber daya alam hutan di Papua Barat	140
10.6.1. Implementasi pengelolaan sumber daya alam (lahan) di Papua Barat	140
10.6.2. Strategi penghidupan untuk masyarakat adat.....	142
10.7. Rekomendasi pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan	144
10.7.1. Pendekatan perspektif keadilan lingkungan sebagai strategi intervensi kebijakan tata kelola SDA	144
10.7.2. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berbasis keadilan di Papua Barat.....	146
10.7.3. Integrasi wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam tata ruang sebagai strategi intervensi kepastian hukum ruang/wilayah adat.....	147
10.7.4. Peningkatan kapasitas masyarakat adat sebagai strategi intervensi terhadap kerentanan masyarakat adat.....	147
BAB XI. KESIMPULAN DAN SARAN	150
11.1. Kesimpulan	150
11.2. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
RINGKASAN	166

SUMMARY.....	176
LAMPIRAN.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik penelitian terkait.....	10
Tabel 2. Kondisi dan mekanisme akses atas sumber daya alam	19
Tabel 3. Tahapan eskalasi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam	22
Tabel 4. Matriks tujuan, pertanyaan penelitian, metode pengumpulan dan sumber data.....	41
Tabel 5. Dimensi dan indikator keadilan lingkungan	42
Tabel 6. Definisi elemen dan fakta dalam kerangka ACP menurut Krott, et al (2011).....	44
Tabel 7. Definisi elemen dan fakta dalam analisis ACP menurut Juerges (2021)	44
Tabel 8. Luas wilayah distrik di Kabupaten Tambrauw	48
Tabel 9. Kampung di distrik Kebar dan distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw	49
Tabel 10. Rata-rata curah hujan, hari hujan dan kriteria tipe hujan di wilayah studi periode 10 tahun (2011-2020)	50
Tabel 11. Range nilai Q dan kriteria iklim Schmidt -Ferguson	51
Tabel 12. BK, BL, BB menurut kriteria Schmidth-Ferguson di wilayah studi.....	51
Tabel 13. Jenis tanah pada perkebunan PT. BAPP	52
Tabel 14. Jenis-jenis vegetasi hutan alam sekunder.....	54
Tabel 15. Jenis-jenis satwa liar di wilayah studi.....	54
Tabel 16. Komposisi penduduk di Distrik Kebar dan Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw.....	55
Tabel 17. Sebaran kelompok suku / marga Suku Mpur di Kabupaten Tambrauw	57
Tabel 18. Klasifikasi aktor dalam perizinan alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pengembangan sawit PT. BAPP	64
Tabel 19. Sumber konflik masyarakat adat dan PT. BAPP di Kebar	71
Tabel 20. Bentuk manifestasi dan visibilitas konflik masyarakat adat dan PT.BAPP	76
Tabel 21. Resolusi konflik masyarakat adat Suku Mpur dan PT. BAPP.....	78
Tabel 22. Alokasi luasan PT BAPP sesuai Surat Bupati Kabupaten Tambrauw, 2020	85
Tabel 23. Sistem kepemimpinan tradisional masyarakat adat Papua	94
Tabel 24. Dualisme kelembagaan masyarakat adat di Tanah Papua	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan teori rezim kepemilikan.....	17
Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian	34
Gambar 3. Lokasi penelitian di Kabupaten Tambrau	37
Gambar 4. Peta administrasi Kabupaten Tambrau	49
Gambar 5. Vegetasi ekosistem padang sabana didominasi oleh rumput alang-alang	53
Gambar 6. Vegetasi semak belukar.....	53
Gambar 7. Vegetasi hutan alam sekunder.....	54
Gambar 8. Sistem kepemimpinan tradisional masyarakat adat Suku Mpur	59
Gambar 9. Sejarah proses alih fungsi kawasan hutan sebagai areal perkebunan PT. BAPP di Kebar	63
Gambar 10. Tahapan eskalasi konflik lahan di Kebar 2014 – 2021	72
Gambar 11. Pola eskalasi konflik menurut pihak yang bertikai	76
Gambar 12. Pola ulangan terjadinya konflik.....	77
Gambar 13. Peta Penyebaran izin usaha pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Papua Barat.....	83
Gambar 14. Peta pembagian wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat....	93
Gambar 15. Sumber kuasa aktor dalam perizinan alih fungsi kawasan hutan untuk areal perkebunan PT. BAPP periode 2007 – 2014.....	100
Gambar 16. Manifestasi ketidakadilan pada periode 2007 – 2014.....	100
Gambar 17. Sumber kuasa aktor dalam implementasi skema perkebunan PT. BAPP periode 2015 – 2021	102
Gambar 18. Peta penutupan lahan di areal PT BAPP Tahun 2014.....	112
Gambar 19. Sisa rumpun sagu (<i>Metroxylon spp.</i>), di areal PT. BAPP (Foto. Tahun 2019)	114
Gambar 20. Manifestasi Ketidakadilan pada periode 2015 – 2021	115
Gambar 21. Persepsi masyarakat adat Suku Mpur tentang akses pada kawasan	115
Gambar 22. Tingkat pendidikan masyarakat di kampung Inam, Arumi dan Wasanggon.....	117
Gambar 23. Mata pencaharian penduduk di sekitar areal PT. BAPP	119
Gambar 24. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tambrau tahun 2016 – 2020.....	120
Gambar 25. Konflik sebagai gejala ketidakadilan dalam konflik masyarakat adat Suku Mpur dan PT. BAPP	133
Gambar 26. Kerangka keadilan lingkungan.....	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar nama informan penelitian.....	186
Lampiran 2. Daftar nama responden.....	190
Lampiran 3. Kusioner survei rumah tangga sebelum ujicoba.....	192
Lampiran 4. Kusioner survei rumah tangga setelah ujicoba	195
Lampiran 5. Panduan pertanyaan informan kunci (aktor terkait konflik) sebelum ujicoba.....	197
Lampiran 6. Panduan pertanyaan informan kunci (aktor terkait konflik) setelah ujicoba.....	198
Lampiran 7. Panduan pertanyaan informan kunci (masyarakat adat, kelembagaan adat) sebelum ujicoba	200
Lampiran 8. Panduan pertanyaan informan kunci (masyarakat adat, kelembagaan adat) setelah ujicoba.....	202
Lampiran 9. Panduan pertanyaan informan kunci (PT.BAPP) sebelum ujicoba	204
Lampiran 10. Panduan pertanyaan informan kunci (PT BAPP) setelah ujicoba	205
Lampiran 11. Panduan pertanyaan informan kunci (pemerintah) sebelum ujicoba	206
Lampiran 12. Panduan pertanyaan informan kunci (pemerintah) setelah ujicoba	207
Lampiran 13. Kuisisioner relasi kuasa sebelum dan sesudah ujicoba	208
Lampiran 14. SK Pelepasan Kawasan Hutan PT BAPP	211
Lampiran 15. Izin lokasi budidaya tanaman pangan dan pengolahan PT BAPP	218
Lampiran 16. Izin usaha budidaya tanaman pangan dan pengolahan PT BAPP	221
Lampiran 17. Surat Bupati Tambrau tentang perubahan komoditi kelapa sawit	224
Lampiran 18. Arahan KLHK tentang tindak lanjut AMDAL PT BAPP	225
Lampiran 19. Surat Bupati Kabupaten Tambrau tentang tindak lanjut proses AMDAL PT BAPP	227
Lampiran 20. Pernyataan sikap komponen masyarakat adat lembah Kebar.....	228
Lampiran 21. Pernyataan sikap bersama masyarakat adat di lembah Kebar	233
Lampiran 22. Dinamika kuasa Periode 2007 – 2014	235
Lampiran 23. Dinamika kuasa periode 2015 - 2021	236

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ACP	: <i>Actor Centered-Power</i>
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
AMAN	: Aliansi Masyarakat Nusantara
APL	: Areal Penggunaan Lain
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DPRPB	: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
FPIC	: <i>Free Prior Informed Consent</i>
GKI	: Gereja Kristen Injili
HGU	: Hak Guna Usaha
HHK	: Hasil Hutan Kayu
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HPK	: Hutan Produksi Konversi
ILO	: <i>International Labour Organisation</i>
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
KEM-ATR / BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KLHK	: Kementerian Lingkungan dan Kehutanan
KPKC	: Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
KSP	: Kawasan Strategis Provinsi
LP3BH	: Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MRPB	: Majelis Rakyat Papua Barat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PADIATAPA	: Prinsip-prinsip Penyediaan Informasi Awal Tanpa Paksaan
PANSUS	: Panitia Khusus
PERDASUS	: Peraturan Daerah Khusus
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RZWP3K	: Rencana Tata Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDA	: Sumber Daya Alam
SDAH	: Sumber Daya Alam Hutan